

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan Nasional adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sarana pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan yang merupakan penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi.

Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia, pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara keseluruhan yang menyangkut faktor-faktor penyebab kemiskinan. Beberapa bagian yang menjadi pengurangan kemiskinan yang perlu ditindak lanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah pemerataan Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks bagi setiap penduduk yang berada di setiap negara, dalam hal ini penduduk yang dikatakan miskin apabila pendapatannya rendah, pendidikan yang rendah, tingkat produktivitas yang dihasilkan rendah, tingkat kesehatan rendah serta gizi yang tidak baik, dan juga tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Adapun kemiskinan juga di sebabkan karena sumber daya manusia yang tidak memadai dan hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan baik itu formal maupun non-formal Sadiyah Arianti (2012).

Permasalahan sosial yang terjadi pada setiap negara yang berkembang termasuk Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi permasalahan sosial sejak dulu, ini dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang yang pastinya akan memiliki permasalahan pada tingkat kemiskinan pada penduduknya. Masalah ini merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional di Indonesia. Maka dalam hal ini upaya

dalam mengentaskan kemiskinan harus dilakukan dengan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan harus dilaksanakan secara terpadu Nasir (2008). Adapun menurut Kuncoro (2017) dalam penelitiannya mengartikan kemiskinan sebagai “ketidakmampuan penduduk/seseorang dalam memenuhi standar kebutuhan minimum”. Adapun kebutuhan-kebutuhan dasar yang harusnya terpenuhi oleh penduduk untuk dapat kehidupan yang layak sehingga bisa terhindar dari kemiskinan yaitu meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan Rini & Dugiarto (2010)

Salah satu masalah kompleks yang sering terjadi di negara maju maupun negara berkembang adalah kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, sebagai negara yang berkembang maka masalah kemiskinan di Indonesia menjadi perhatian yang utama. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilaksanakan secara menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Nasir (2008). Meskipun pada realitanya kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sulit dicari solusinya.

Pemerintah juga telah banyak menerapkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Namun, program program ini belum memiliki strategi dan kebijakan yang tepat karena tidak langsung berpihak pada lapisan masyarakat yang paling miskin Mikkelsen Britha (2013),tetapi hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi di Indonesia, pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi mencapai angka sebesar 8,19 persen, hal tersebut menjadi permasalahan yang seharusnya bisa di perhatikan oleh pemerintah Provinsi Jambi, mengingat bahwasanya kemiskinan menjadi momok yang dapat membuat pembangunan ekonomi di suatu daerah menjadi melambat dan pemerintah akan dianggap gagal dalam menjalankan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi ialah dengan pengentasan kemiskinan yang terjadi di suatu

daerah dan hal tersebut harus bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik.

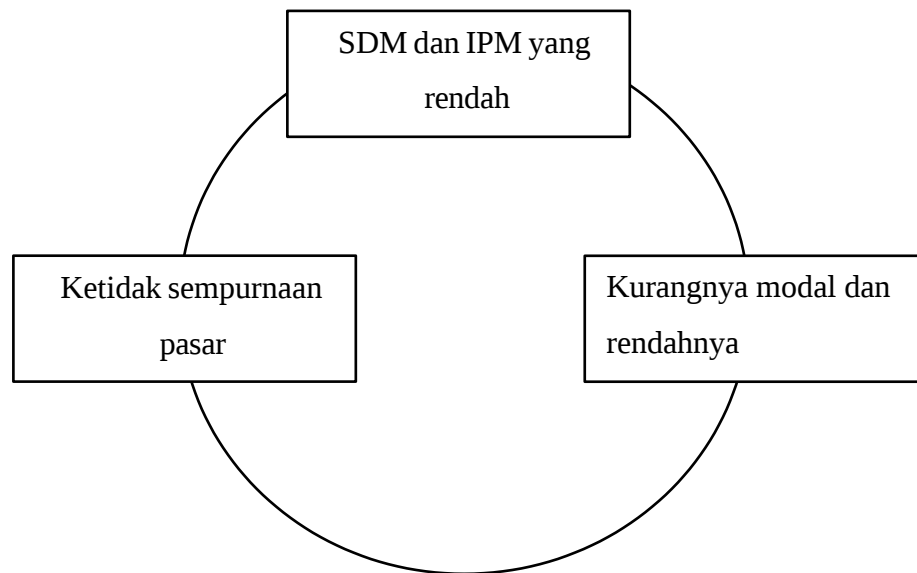
Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi 2017-2021

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi Jambi	8,19	7,92	7,60	7,58	8,09
Kerinci	7,45	7,07	7,13	7,30	7,71
Merangin	9,43	8,88	8,48	8,63	9,11
Sarolangun	8,87	8,73	8,45	8,42	8,87
Batanghari	10,33	10,23	9,75	9,65	10,05
Muaro Jambi	4,37	4,05	3,83	3,83	4,53
Tanjung Jabung Timur	12,58	12,38	11,54	10,95	11,39
Tanjung Jabung Barat	11,32	11,10	10,56	10,29	10,75
Tebo	6,79	6,58	6,47	6,26	6,68
Bungo	5,82	5,78	5,60	5,80	6,23
Kota Jambi	8,84	8,49	8,12	8,27	9,02
Kota Sungai Penuh	2,78	2,76	2,81	3,03	3,41

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Jambi mengalami laju penurunan dan kenaikan yang signifikan, selama tahun 2017 sampai 2020 penduduk miskin di Provinsi Jambi mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021.

Menurut Kuncoro (2017), penyebab kemiskinan adalah berdasarkan dari teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) di mana terdapat tiga faktor utama yaitu : (i) Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, (ii) Ketidak sempurnaan pasar, dan, (iii) Kurangnya modal dan rendahnya produktifitas.



Gambar 1. 1 Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

Rendahnya produktifitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh laju Pertumbuhan Ekonomi). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah Sukmaraga (2011).

Pengangguran juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal tersebut akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan Sadono (2010). Angkatan kerja yang tumbuh cepat tentu akan menambah beban tersendiri bagi perekonomian yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru maka sebagian angkatan kerja baru itu akan memperpanjang barisan penganggur yang sudah ada Dumairy (2016)

Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi 2017-2021

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	3,26	2,74	2,62	2,43	2,32
Merangin	4,10	3,47	3,68	4,86	4,83
Sarolangun	2,25	4,06	4,09	5,71	5,52
Batang Hari	3,57	3,87	4,56	4,42	4,26
Muaro Jambi	5,39	4,52	5,20	5,43	5,59
Tanjung Jabung Timur	2,36	1,80	1,63	1,41	1,56
Tanjung Jabung Barat	3,07	2,38	2,57	2,16	2,53
Tebo	1,98	2,00	2,90	2,95	2,83
Bungo	4,89	3,03	3,82	5,94	5,86
Kota Jambi	5,55	6,41	6,53	10,49	10,66
Sungai Penuh	4,14	5,13	4,00	5,56	3,00

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terlihat bahwa jumlah pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jambi dari tahun 2017-2021 terlihat fluktuatif. Pada kurun waktu tersebut, terlihat bahwa jumlah pengangguran terbuka masih lebih dari satu persen. Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab dalam kemiskinan yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah suatu perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi termasuk ke dalam masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor- faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor- faktor produksi

pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya Sadono (2010). Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara jika terus meningkat pada waktu- kewaktu, ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut mengalami peningkatan, sebaliknya apabila perekonomian tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan, itu menunjukan bahwa perekonomian suatu wilayah tersebut tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami kemajuan yang baik. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah bagi suatu negara dan akan memperburuk perekonomian di negara tersebut, hal terburuk yang akan timbul dalam masalah perekonomian tersebut diantaranya adalah masalah kemiskinan.

Tabel 1. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2017-2021

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2017-2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi Jambi	4,60	4,69	4,35	-0,44	3,66
Kerinci	5,86	4,93	4,23	3,86	4,16
Merangin	5,39	4,93	4,36	0,83	5,09
Sarolangun	4,68	4,80	4,26	-0,25	6,61
Batanghari	4,81	4,83	4,37	-0,39	4,74
Muaro Jambi	4,95	5,01	4,79	0,37	4,08
Tanjung Jabung Timur	3,07	2,94	4,38	-3,92	0,13
Tanjung Jabung Barat	4,48	6,77	5,01	-0,60	1,36
Tebo	5,58	4,98	4,39	-0,02	4,32
Bungo	5,68	4,65	4,19	-0,44	5,12
Kota Jambi	4,68	5,30	4,40	-3,96	3,94
Kota Sungai Penuh	6,02	4,88	5,01	-0,16	3,67

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan tabel 1. 3 dapat di ketahui bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi mengalami perubahan setiap tahunnya.

Faktor lain yang memiliki hubungan terhadap kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Napitupulu & Gandasari (2007) mengatakan bahwa IPM merupakan salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakatnya juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia.

Keberhasilan suatu pembangunan manusia tidak lepas dari adanya campur tangan pemerintah atau kinerja pemerintah dalam menciptakan peraturan atau regulasi. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari teori pembentukan IPM. Pemerintah memiliki peran dalam pembangunan manusia melalui pengeluaran pemerintah dari sektor publik yaitu pada anggaran di bidang kesehatan untuk dapat meningkatkan angka harapan hidup maupun untuk menurunkan angka kematian. Pada bidang pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga dapat meningkatkan angka melek huruf. Kemudian pada pengeluaran pemerintah seperti belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk bisa meningkatkan pendapatan riil perkapita yang terdapat pada bidang standar hidup layak Baeti (2013). Berikut ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 :

Tabel 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2017-2021

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi Jambi	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63
Kerinci	70,03	70,59	70,95	71,21	71,45
Merangin	68,30	68,81	69,07	69,19	69,53
Sarolangun	69,03	69,41	69,72	69,86	70,25
Batanghari	68,92	69,33	69,67	69,84	70,11
Muaro Jambi	67,86	68,34	69,01	69,18	69,55
Tanjung Jabung Timur	62,61	63,32	63,92	64,43	64,91
Tanjung Jabung Barat	66,15	67,13	67,54	67,54	68,16
Tebo	68,16	68,67	69,02	69,14	69,35
Bungo	69,04	69,42	69,86	69,92	70,15
Kota jambi	76,74	77,41	78,26	78,37	79,12
Kota Sungai Penuh	73,75	74,67	75,36	75,42	75,70

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi dari tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai dari segi pendidikan, kesehatan, nilai moral dan etika dan lain sebagainya merupakan modal pembangunan yang handal bagi suatu negara, namun sebaliknya apabila kualitasnya rendah justru akan menjadi beban pembangunan sehingga akan menjadi penghambat pembangunan. Masalah pertumbuhan penduduk tidak hanya sekedar masalah jumlah, masalah penduduk juga menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Pada umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan. Keberadaannya apalagi dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Pada literatur modern penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan. Berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang yang membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Konsumsi dari penduduk ini yang menimbulkan permintaan agregat. Peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan Dumairy (2016).

Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun Todaro M.P (2006).

Tekanan masalah kependudukan atas pembangunan sesungguhnya tidak terlalu berhubungan dengan aspek jumlah, melainkan lebih terkait dengan variabel-variabel lain kependudukan. Variabel-variabel tersebut antara lain: sebaran, komposisi, kepadatan dan pertumbuhan penduduk dan ada juga karakteristik penduduk yang bersangkutan seperti tingkat pendapatan, kesehatan dan kemiskinan Dumairy (2016). Berikut ini adalah perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 :

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2017-2021

Wilayah	Penduduk Provinsi Jambi (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi Jambi	3.458.926	3.515.017	3.570.272	3.624.579	3.677.894
Kerinci	235.802	236.782	237.791	238.682	239.606
Merangin	372.205	377.905	383.480	388.928	394.174
Sarolangun	284.201	290.231	295.985	301.908	307.585
Batanghari	263.896	266.971	269.966	272.879	275.504
Muaro Jambi	410.337	421.179	432.305	443.364	454.524
Tanjung Jabung Timur	215.316	216.777	218.413	219.985	221.619
Tanjung Jabung Barat	316.811	322.527	328.343	333.932	339.286
Tebo	337.022	343.003	348.760	354.485	360.193
Bungo	351.878	359.590	367.182	374.770	382.311
Kota jambi	583.487	591.134	598.103	604.736	611.353
Kota Sungai Penuh	87.971	88.918	89.944	90.910	91.739

Sumber : BPS, 2022

Pada Tabel 1.5 terlihat bahwa dari tahun 2017-2021 jumlah penduduk di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari 3.458.926 jiwa di tahun 2017 menjadi 3.515.017 jiwa pada tahun 2018, 3.570.272 jiwa pada tahun 2019 , 3.624.579 jiwa pada tahun 2020 dan 3.677.894 jiwa pada tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita temukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk. Penentuan upah minimum akan berdampak pada penempatan pekerjaan yang akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Sedangkan pada tingkat pengangguran, ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga ikut naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun, selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan karena masyarakat

yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya pasti miskin. Rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi yang terjadi juga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Indeks pembangunan Manusia yang berkualitas juga sangat dibutuhkan karena IPM yang berkualitas dapat mempercepat pembangunan suatu daerah/negara sehingga dapat mengatasimasalah kemiskinan yang terjadi. Selain itu, perkembangan jumlah penduduk yang pesat di negara-negara berkembang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami tingkat pertumbuhan yang berarti dan dalam jangka panjang mungkin menurun serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, IPM dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi maka peneliti tertarik untuk menganalisis masalah ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi dan perkembangan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis kondisi dan Perkembangan Tingkat Kemiskinan,

Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2. Untuk Menganalisis Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta mengetahui secara praktis bagaimana perkembangan dan pengaruh tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, IPM dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.
2. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Dapat menambah pengetahuan tentang faktor pengaruh serta perbedaan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.